

Kabar

RBP GCF REDD+ SULTENG OUTPUT 2

Edisi 5 | 1- 31 Desember 2025

KPH Balantak dan
Satgas PKA Mitigasi
Konflik Tenurial di
Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah
Berhasil Petakan Potensi
Hutannya

Upaya Pencapaian
Target Ekonomi
Perhutanan Sosial
di Kabupaten Sigi

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat,
KPH Pulau Peling Manfaatkan *Bete*

Penyelesaian Konflik Tenurial di Hutan Sulawesi Tengah



PENGANTAR

Edisi newsletter ini menghadirkan rangkaian upaya penguatan tata kelola hutan di Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), masyarakat, serta KEMITRAAN dalam kerangka Program Results Based Payment (RBP) GCF REDD+.

Isu konflik tenurial menjadi salah satu fokus utama dalam edisi ini. Melalui berbagai workshop dan forum lintas pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama KEMITRAAN mendorong penyamaan persepsi, penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator, serta keterlibatan aktif seluruh pihak dalam penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Pendekatan kolaboratif ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya berkaitan dengan kepastian penguasaan lahan, tetapi juga keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, dan prasyarat bagi peningkatan kesejahteraan serta iklim investasi yang kondusif.

Newsletter ini juga menyoroti upaya mitigasi konflik tenurial di tingkat tapak, seperti yang dilakukan oleh KPH Balantak bersama Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA). Data dan refleksi yang disampaikan menunjukkan kompleksitas konflik agraria di Sulawesi Tengah yang membutuhkan sinergi antar lembaga, keberanian dalam pengambilan kebijakan, serta perhatian serius

terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Selain konflik tenurial, edisi ini mengangkat pentingnya inventarisasi dan pemetaan potensi hutan sebagai dasar pengelolaan yang berkelanjutan. Kegiatan pemetaan potensi hutan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Poso, menunjukkan komitmen untuk memastikan pemanfaatan hutan berjalan seimbang antara nilai ekonomi dan konservasi. Identifikasi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, serta keanekaragaman hayati menjadi langkah penting dalam memperkuat perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui perhutanan sosial juga menjadi bagian penting dari rangkaian cerita dalam newsletter ini. Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS), penguatan kapasitas kelompok, hingga pengembangan produk hasil hutan bukan kayu seperti pengolahan ubi lokal di Pulau Peling menunjukkan bagaimana hutan dapat dikelola sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan, sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

Melalui edisi ini, kami berharap pembaca dapat melihat keterhubungan antara penyelesaian konflik, penguatan tata kelola, dan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai satu kesatuan upaya dalam menjaga hutan Sulawesi Tengah agar tetap lestari dan memberikan manfaat yang adil bagi semua.



KPH Balantak dan Satgas PKA

Mitigasi Konflik Tenurial di Sulawesi Tengah

Menurut data Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), terdapat 58 desa di 12 kabupaten yang terdampak konflik agraria meliputi permasalahan penguasaan lahan yang melibatkan berbagai aktor, seperti perusahaan kelapa sawit, pemerintah dan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas PKA Sulawesi Tengah, Eva Susanti Bande dalam workshop identifikasi dan pengendalian konflik tenurial di kawasan hutan, khususnya di wilayah Kabupaten Banggai yang diselenggarakan oleh KPH Balantak dan KEMITRAAN.

“Masalah kriminalisasi petani yang mengelola lahan di kawasan hutan adalah persoalan yang sangat serius. Ini menunjukkan betapa kompleksnya konflik yang kita hadapi bukan hanya soal kepemilikan lahan, tapi juga keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat,” ujarnya.

●●●

Ia juga menyebut dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan konflik yang saat ini sudah bersifat struktural.

"Kita membutuhkan sinergi antar lembaga dan keberanian politik untuk berani mengambil keputusan yang sulit demi kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala KPH Balantak, Yunus Papea, menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian dari upaya strategis KPH dalam mengelola kawasan hutan secara efektif.

"Hutan bukan hanya soal pohon dan lahan, tapi juga soal kehidupan manusia yang bergantung pada sumber daya tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh" jelasnya.

Kiki Rizki Amalia, Program Officer PMU KEMITRAAN, menegaskan bahwa konflik tenurial di kawasan hutan merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan agar pengelolaan hutan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Penyelesaian konflik ini tidak hanya berkontribusi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung target nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31 % yang telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia dalam perjanjian iklim internasional," terangnya.

Workshop ini menghadirkan peserta antara lain pemerintah daerah Kab Banggai (DLH, BPN dan Dinas Pertanian), Polres Banggai, Universitas Muhammadiyah, Universitas Tompotika, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, pemerintah desa dan organisasi yang peduli terhadap pengelolaan hutan di Kab Banggai.



WORKSHOP

PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

"Perkuat Sinergi dan Kolaborasi antara pihak
dalam Penanganan Konflik Kawasan"



Penyelesaian Konflik Tenurial *di Hutan Sulawesi Tengah*

Melalui Program Results Based Payment (RBP) dari GCF REDD+ Output 2, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan KEMITRAAN memfasilitasi pelaksanaan workshop penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh *stakeholder* terkait; Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kehutanan, KPH dan Tahura, Dinas Lingkungan Hidup, Kanwil BPN, Satgas PKA, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, CSO lokal dan masyarakat adat.

Dalam sambutannya mewakili Gubernur, Rudi Dewanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menegaskan peran penting pemerintah provinsi sebagai fasilitator, mediator, dan regulator dalam setiap tahapan penyelesaian konflik tenurial di Sulteng.

"Mari kita sama-sama menyatukan persepsi supaya keruwetan konflik bisa terurai dan segera diselesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Julmansyah, menyampaikan dukungan dekaligus mendorong pemprov untuk memaksimalkan peran seluruh Balai Kemenhut yang ada di Sulteng sebagai mitra strategis penyelesaian konflik.

Ia juga mengingatkan pentingnya penyelesaian konflik tenurial sebagai prasyarat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau konflik selesai maka investasi akan kondusif, ekonomi berputar dan pasti kemiskinan akan turun," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Muhammad Neng, Kepala Dinas Kehutanan, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat melahirkan solusi dan rekomendasi penguatan tata kelola hutan yang adil, inklusif dan berkelanjutan, salah satunya melalui skema perhutanan sosial.

"Perhutanan Sosial dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan konflik tenurial," ujarnya.

Ia menyebut, program perhutanan sosial di wilayahnya telah berkorelasi kuat dengan satu dari 9 program BERANI yang merupakan visi dari Pak Gubernur, yakni BERANI Makmur dalam memperkuat ekonomi hijau dan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Selain membahas serta mendiskusikan gambaran kebijakan dan peta konflik di Sulawesi Tengah, kegiatan juga merumuskan rekomendasi perbaikan.



Provinsi Sulawesi Tengah Berhasil Petakan Potensi Hutannya

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah bersama KEMITRAAN dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah melakukan pemetaan potensi hutan Poso untuk memperkuat tata kelola pemanfaatan yang tidak hanya mengedepankan potensi ekonomi, melainkan juga konservasi.

Di KPH Sintuvu Maroso Kabupaten Poso misalnya, mereka bersama kelompok LPHD Sulewana Desa Sulewana dan HKm Kaju Ombo Kel Lembomawo berhasil mengidentifikasi jenis kayu, potensi non kayu, jasa lingkungan, serta keanekaragaman hayati.

Yerni Yunita, dari KPH Sintuvu Maroso menyebut kegiatan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 13 yang mengatur proses, langkah-langkah serta tujuan inventarisasi hutan.

“Inventarisasi hutan merupakan langkah penting dalam upaya memetakan potensi, serta mengelola sumber daya hutan secara efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Proses identifikasi menemukan sebanyak 86 jenis pohon jenis Bayur dan Ayo serta jenis pohon rimba campuran lainnya yang belum memiliki nama lokal. Sementara untuk hasil hutan bukan kayu, Rotan, Nibong dan Aren menjadi tiga potensi terbesar.

Dasmin Ndo'o, ketua LPHD Sulewana menyampaikan, kegiatan ini dilakukan agar semua anggota kelompok dapat memahami potensi yang ada di dalam kawasan hutan, sehingga dapat dimanfaatkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

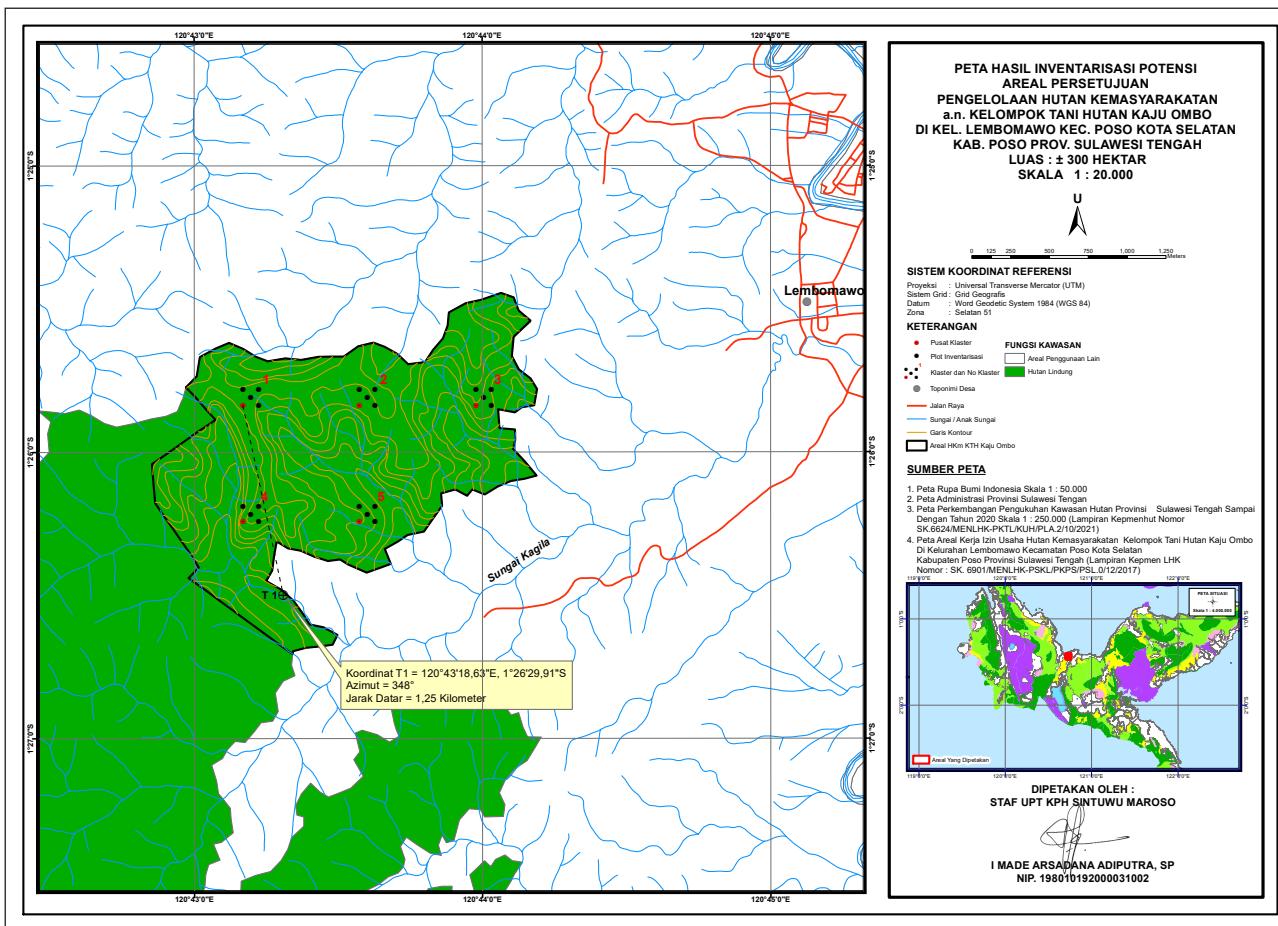
“Kawasan hutan menyimpan banyak potensi yang dapat dimanfaatkan dan menghasilkan nilai ekonomi yang selama ini kita tidak ketahui,” jelasnya.

Kiki Rizki Amalia, project officer PMU KEMITRAAN, kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola hutan di Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh KEMITRAAN dan Dinas Kehutanan Provinsi melalui program RBP GCF REDD+.

Selain di Poso, kegiatan serupa juga dilakukan bersama KPH yang tersebar di Provinsi Sulteng; KPH Banawa Lalundu Kabupaten Donggala, KPH Tepe Asa Maroso Kabupaten Morowali, KPH Balantak Kabupaten Banggai, KPH Pulau Peleng Banggai Kepulauan, KPH Pogogul Kabupaten Buol, KPH Dolago Tanggung Kabupaten Parigi Mautong, KPH Dampelas Tinombo Kabupaten Parigi Mautong, KPH Gunung Dako Kabupaten Toli – Toli, dan KPH Kulawi Kabupaten Sigi.

“Pemanfaatan hutan harus sejalan dengan peningkatan nilai konservasi, agar hutan tetap memberi manfaat dari sisi ekologis dan ekonomi. Inventarisasi potensi merupakan bagian untuk memetakan dan memilih potensi mana yang dapat dimanfaatkan dan mana yang harus dilindungi,” tegasnya.





Upaya Pencapaian Target Ekonomi Perhutanan Sosial

di Kabupaten Sigi

Melalui program RBP GCF REDD+, Dinas Kehutanan Provinsi melalui KPH Kulawi dan KEMITRAAN memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) di LPHD Tangkulowi dan Boladangko.

Proses penyusunan dokumen dilakukan bersama anggota kelompok, pemerintah desa, tokoh perempuan dan masyarakat adat difasilitasi oleh pendamping PS.

Dodi, S.Hut., M.Si, KPH Kulawi menyampaikan, penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial ini merupakan langkah untuk menata pengelolaan dan pemanfaatan hutan agar tersusun dengan baik dalam 10 tahun ke depan.

“Kami memastikan semua kelompok yang menerima SK Perhutanan Sosial di wilayah KPH Kulawi, memiliki dokumen rencana kerja agar pemanfaatan hutan memberikan peningkatan ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan mencegah kerusakan hutan dari aktivitas perambahan,” ujarnya. →

Selain rencana kerja 10 tahun, kegiatan juga merumuskan penyusunan rencana kerja satu tahunan (RKT – PS). Di dalam rencana kerja LPHD Boladangko, Erlin selaku sekertaris kelompok menyebut fokus kegiatan di tahun depan, yakni melakukan patroli rutin bersama KPH Kulawi, menjaga mata air, rehabilitasi areal rawan longsor dan bantaran sungai, serta memperkuat sangsi adat kepada pelaku perusak hutan.

Sementara dari sisi pemanfaatan hutan untuk ekonomi, Erlin menyampaikan prioritas kelompoknya, yakni pemanenan madu hutan, agroforestry kopi, jasa lingkungan arung jeram dan rotan (HHBK).

Sementara di LPHD Tangkulawi, rencana kerja tahunannya akan melakukan serangkaian peningkatan kapasitas anggota kelompok serta memperkuat kerja sama dengan swasta untuk usaha rotan dan getah damar.

Dua dokumen RKPS yang telah disusun akan dikonsultasikan kepada BPSKL Wilayah Manado seksi Wilayah II, untuk mendapatkan masukan dan pengesahan.

Kiki Rizki Amalia, Project officer PMU KEMITRAAN, kegiatan ini untuk mendorong tata kelola hutan memenuhi indikator pencapaian nilai ekonomi perhutanan sosial (NEKON) yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan dan pemulihhan hutan dari deforestasi.

“Perhutanan sosial menjadi pilar utama untuk melindungi hutan dari berbagai ancaman, masyarakat menjadi garda terdepan sebagai pelopornya. KEMITRAAN lewat program RBP GCF REDD+, akan mendukung upaya untuk penguatan kapasitas dan sarana prasarana bagi masyarakat,” tegasnya.







Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, KPH Pulau Peling Manfaatkan Bete

Bete merupakan jenis ubi lokal yang ditanam oleh mayoritas masyarakat di Kab Banggai Kepulauan dan Kab Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, dan menjadi sumber pangan utama masyarakat pengganti beras.

Ketersediaan jumlah yang besar dan masih minimnya produk olahan untuk *bete* menjadikan KPH Pulau Peling melalui program RBP GCF REDD+ Sulteng, melakukan pendampingan kepada LPHD Usuma di Desa Poposi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mencari alternatif produk pengolahan untuk ketahanan ekonomi masyarakat.

Setelah membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), LPHD Usuma melakukan kegiatan pelatihan pengolahan bete menjadi keripik dan pengeemasan untuk meningkatkan nilai jual produk.

Adiston Samadake, dari KPH Pulau Peling, menerangkan bahwa pelatihan peningkatan kapasitas KUPS untuk mendorong produk Ubi Banggai dapat menjadi lebih berkualitas dan memperluas pasar sampai keluar daerah.

“Ubi Banggai mempunyai nilai historis yang kuat dengan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kami yakin produk turunannya dapat memiliki nilai jual yang dapat membantu ekonomi, menjaga fungsi ekologis dan penyangga hutan. Sebab tanaman ini tidak tersentuh oleh bahan kimia sama sekali,” ujarnya. →

Senada dengan beliau, Ketua KUPS, Hasrianto Lamari, menyebut upaya ini untuk memperkuat ekonomi anggota kelompok.

“Selama ini, proses produksi Ubi Banggai hanya menggunakan alat sederhana dan dijual dengan harga Rp 10.000 – 15.000, dalam kemasan plastik biasa dan dipasarkan melalui warung kelontong di desa – desa hingga ke kecamatan. Hasil keuntungan, menjadi pendapatan kelompok dan dibagi ke anggota” jelasnya.

Berkat pelatihan, kini harga keripik dengan merk Ubi Kapalang seberat 250 gram dijual Rp. 50.000, sebelumnya hanya Rp. 15.000.

Edy Wicaksono, Program Manager PMU KEMITRAAN, menyebut pengelolaan hasil hutan harus berbarengan dengan peningkatan kapasitas kelompok. Hal ini dilakukan, agar pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara imbang antara manfaat ekonomi dan pelestarian hutan.







Kabar

RBP GCF REDD+ SULTENG OUTPUT 2



bpdlh
Badan Pengelolaan
Lahan dan Hutan



kemitraan
partnership